

KEBIJAKAN CHINA PASKA PERANG DAGANG, PANDEMIK DAN ANTISIPASI MENGHADAPI RESESI DUNIA TAHUN 2023

**Febri Dirgantara Hasibuan¹, Azzahra Egidia Nuraini², Rama Maulana Putra³,
Anna Tasya Nur Fitriani⁴, Andhiene Kartika Sudrajat⁵**
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³⁴

Abstract

The increasing tension in trade relations between China and America has forced China to take steps to maintain the stability of China's economy, especially since China's economy has just recovered from the Covid-19 pandemic. Therefore, in facing the 2023 economic crisis, China has prepared policies to achieve its national interests, especially in the economic aspect. In analyzing China's foreign policy to deal with the 2023 economic problems, the foreign policy, and national interest concept is used as an approach from the perspective of Neoclassical Realism. The qualitative method is used, where data are collected through library research, by taking various sources and references to support this research. Data collection techniques are through listening and recording important information in conducting data analysis through data reduction. The findings in this paper are to push forward the BRI program and BRICS activation through geoeconomic strategy

Keywords: World Economic Problems; Belt and Road Initiative (BRI); China; National Interest; Leadership; Hegemony

Abstrak

Meningkatnya tensi hubungan dagang antara China dan Amerika memaksa China mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi China, apalagi ekonomi China baru pulih dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 2023, China telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri China untuk menghadapi masalah ekonomi 2023, digunakan konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional sebagai pendekatan dari perspektif Realisme Neoklasik. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengambil berbagai sumber dan referensi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui mendengarkan dan mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data melalui reduksi data. Temuan dalam makalah ini adalah untuk mendorong program BRI dan aktivasi BRICS melalui strategi geoekonomi

Kata kunci: Masalah Ekonomi Dunia; Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI); Cina; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemoni

Copyright (c) 2023 Febri Dirgantara Hasibuan.

✉ Corresponding author : Febri Dirgantara Hasibuan
Email Address: febri.dirgantara@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Dunia di tahun 2019 menghadapi permasalahan global dengan kemunculan wabah virus Corona (covid-19) yang bermula di kota Wuhan, China. Keganasan virus ini diawal penyebarannya seperti ditutup-tutupi oleh pemerintahan China, sehingga hanya menjadi masalah kesehatan lokal saja. Hingga memasuki bulan Februari dan sepanjang Maret 2020, penyebaran covid-19 teridentifikasi hampir diseluruh dunia sehingga *World Health Organization* mengkategorikannya sebagai permasalahan global. Belum ditemukannya vaksin untuk Covid-19 ketika itu, berdampak pada dikeluarkannya kebijakan penutupan perbatasan dibanyak negara, pemberlakuan *lockdown*, maupun kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat seperti penutupan kegiatan sekolah, penutupan kantor, penutupan sektor pariwisata, serta pelarangan kunjungan warga asing untuk memasuki ke wilayah negara lain demi memotong penyebaran covid-19. Secara umum, sektor ekonomi mengalami perlambatan yang drastis dalam skala global akibat penghentian aktifitas produksi dan penutupan bandara hingga penutupan pelabuhan logistik. Prilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial juga mengalami perubahan secara cepat dari interaksi nyata menjadi interaksi dunia maya (online). Begitu juga dengan para pekerja kantor yang secara kondisional, harus melakukan pekerjaan mereka dari rumah dengan istilah *work from home* (WFH) dimana aktifitasnya menggunakan media digital. Bank Dunia waktu itu memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 5,2 persen *Gross Domestic Product* global, dan secara garis trend indikasinya terendah selama 8 dekade terakhir.

Global Coronavirus Crisis (GCC) tidak hanya menyerang aspek kesehatan global saja, lebih dari itu GCC memiliki dampak yang signifikan dibidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Aspek yang paling besar berpengaruh yaitu dimensi ekonomi, sebab dibeberapa negara, angka pengangguran melonjak tinggi. Lonjakan ini adalah dampak dari banyaknya jumlah perusahaan yang terpaksa tutup usaha akibat efek dari pembatasan kegiatan. Kondisi tersebut menciptakan ketakutan *Great Depression* berulang dibeberapa negara. *Great Depression* diartikan sebagai kondisi menurunnya perekonomian global secara drastis. Dampak yang paling ditakuti dari depresi ini adalah produktivitas ekonomi yang benar-benar turun, yang berarti kinerja ekonomi sangat buruk. Kapasitas ekonomi berada di bawah potensi ekonomi yang ada. Sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak bergerak (stagnan), sehingga perekonomian juga dapat dikatakan dalam keadaan stagnan. Indikator lainnya yang dapat dilihat dari dampak pandemi global ini adalah kemerosotan indeks pasar saham secara global, menurunnya harga minyak dunia akibat timbulnya perang harga minyak dari para produsen minyak yang berebut pasar akibat menurunnya permintaan minyak dampak dari pembatasan aktifitas. Hal tersebut tentunya merupakan ciri awal terjadinya resesi. Resesi merupakan kondisi perputaran ekonomi suatu negara yang mulai melambat dan semakin turun yang berlangsung selama beberapa tahun, dimulai dari ekonomi domestik hingga dapat mempengaruhi ekonomi internasional. Semakin bergantung suatu negara pada ekonomi global, maka akan semakin cepat negara tersebut terdampak resesi global. hina sebagai negara pertama yang terkena dampak dari Covid-19, tentu saja tidak tinggal diam dalam menangani kasus tersebut. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah China untuk menjaga citra negara mereka. Namun persaingan China dengan Amerika Serikat juga tercermin dalam kasus pandemik ini. Dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan bahwa Covid-19 itu adalah virus China. Pernyataan tersebut jelas merugikan citra China dalam perpolitikan internasional. Pada awal penyebaran pandemi, banyak negara di dunia yang menyalahkan China atas masalah Covid-19 ini. Meski China dikenal sebagai kekuatan ekonomi global, namun pemerintah daerah saat itu lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya, sehingga siap menghentikan kegiatan ekonomi. Kebijakan ini tentunya berdampak pada kontraksi ekonomi global. Argumentasi ini sangat berdasar mengingat negara China merupakan salah satu negara yang memiliki nilai dan hubungan perdangangan internasional terbesar di dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil China dalam menghadapi masalah ekonomi 2023, penelitian ini melakukan studi kepustakaan yaitu mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Landasan Teori

Dalam menganalisis kebijakan China setelah perang dagang, paska pandemi dan menghadapi resesi ekonomi 2023, penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Luar negeri dan Kepentingan Nasional menurut *Neoclassical Realism*. Cakupan kebijakan luar negeri didorong dengan kapabilitas kekuasaan (*power*) negara yang berkaitan dengan sistem internasional dalam teori *Realisme Klasik*. Namun menurut perkembangan baru *Neoclassical Realisme*, dampak dari kapabilitas kekuasaan harus dianalisis melalui variabel tambahan dalam tingkat negara. Variabel tambahan tersebut meliputi kapabilitas kekuasaan negara, persepsi pemimpin politik terhadap kekuasaan, yang mana harus dianalisis dari sumber daya tiap negara. Maka dari itu setiap negara memiliki pola perilaku dan struktur yang berbeda beda. *Neoclassical Realisme* memasukkan perspektif *innenpolitik*, yang meliputi faktor domestik negara seperti ideologi politik dan ekonomi, karakter nasional, politik partisan atau struktur sosio ekonomi. Perspektif *innenpolitik* menentukan bagaimana suatu negara berperilaku terhadap negara lainnya. Untuk menyempurnakan perspektif *innenpolitik*, *Neoclassical Realisme* mengaplikasikan dua perilaku negara dalam teori Neorealisme, yaitu *offensive* dan *defensive realism*. Keduanya berasumsi bahwa sistem internasional dibentuk dari negara yang berpikir rasional untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya (*survival*). Pengikut ajaran ini mengembangkan gambaran kompleks dari sistem internasional dan tekanannya yang dibentuk dari variabel domestik, tetapi ada banyak variabel domestik yang menunjukkan adanya hubungan antara sistem dengan pembuatan kebijakan luar negeri menjadi kompleks dan bervariasi.

PEMBAHASAN

Dalam dua dekade terakhir, China berprestasi menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat signifikan dan terus berkembang pesat. Banyak kebijakan positif yang diterapkan guna membangkitkan perekonomian negaranya. Salah satunya yaitu dengan melakukan ekspansi ekonomi di wilayah tertentu dengan menerapkan kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)* dengan tujuan menjadikan China sebagai kekuatan baru atau *New Emerging power*. Hadirnya era globalisasi dinilai memberikan keuntungan bagi China. Karenanya terdapat dua aspek utama yang menjadikan kuatnya komitmen pemerintah pusat China dalam mengimplementasikan kebijakan ekonominya. Pertama, pemerintah China memandang era globalisasi merupakan peluang besar bagi perekonomian China untuk memaksimalkan keuntungan serta meningkatkan perekonomian nasional. Kedua, globalisasi dapat dijadikan sebagai titik awal integrasi China ke dalam organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, bahkan termasuk ke dalam kelompok negara G7, G8 dan G20.

Namun situasi tersebut berubah ketika terjadi *trade war* antara Amerika dan China. Ditambah lagi, pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian global. Penyebaran virus tersebut pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China. Pada awalnya kasus tersebut merupakan kasus domestik negara China, dan pemerintah berusaha menutupi berita tentang penyebaran virus tersebut. Namun gejala penyebaran virus tersebut telah sampai ke berbagai negara dan diidentifikasi menjadi masalah global. Covid-19 merupakan peristiwa yang memberikan dampak masif bagi semua negara diberbagai belahan dunia. Salah satu dampak yang diperkirakan dari peristiwa Covid-19 ini adalah timbulnya resesi di beberapa negara. *World Bank* menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi global mencapai 5,2% pada tahun 2020.

Angka itu merupakan resesi terburuk sejak Perang Dunia II, dengan penurunan terbesar sejak 1870.

Dengan timbulnya kasus tersebut di negara China, tentu saja banyak sektor yang dirugikan, khususnya sektor ekonomi. Banyak aktivitas termasuk kegiatan ekonomi yang terpaksa dikurangi bahkan dihentikan operasinya dimasa pandemi. Dengan adanya pembatasan kegiatan seperti ekspor dan impor, investasi, dan proses produksi, maka memberikan dampak pada menurunnya pendapatan negara China di sektor ekonomi. Menurunnya perekonomian China tentu saja berdampak pada perekonomian global. China merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan PDB dunia, bahkan kontribusi China terhadap makroekonomi diestimasikan mencapai 17% pada 2019. Dengan menurunnya aktivitas ekonomi China tentu saja berdampak pada negara lainnya, salah satu implikasinya yaitu dalam sektor perdagangan. Di sektor perdagangan, dengan diberlakukannya penghentian produksi untuk sementara waktu bagi perusahaan-perusahaan di China, telah berdampak pada kegiatan perdagangan dunia. Peran kuat China dalam perdagangan dunia, khususnya sebagai negara produsen disamping negara konsumerisasi, telah membuat beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, dan Indonesia (posisi World choke point) di Asia Tenggara sangat bergantung pada ekspor dan impor China.

Namun memasuki era *new normal* paska pandemi, China secara gradual berusaha memulihkan perekonomiannya. Hal tersebut terlihat dari dimulainya kembali kegiatan ekspor dan impor dan menunjukkan nilai yang perlahan terus membaik, meskipun surplus perdagangan masih menyusut. Pemulihan ekonomi yang lambat dan tidak merata sehingga masih memberikan banyak dampak yang negatif. Terlebih lagi China dan Amerika Serikat memiliki persaingan ekonomi yang ketat di level internasional setelah fenomena *trade war*. Terbatasnya dukungan yang diberikan pemerintah serta sulitnya pinjaman yang diperoleh, menjadikan banyak perusahaan terpaksa harus ditutup atau bangkrut akibat akses pandemi yang luar biasa. Setelah masa puncak pandemi, pemerintah China telah berinisiatif memulihkan perekonomiannya melalui berbagai macam kebijakan, diantaranya: *Belt and Road Initiative* (BRI) seperti kerjasama ekonomi, keuangan (Yuan Renmimbi), pemberian hutang luar negeri dan investasi luar negeri serta mengaktivasi organisasi BRICS terkait pemulihan ekonomi bersama.

Kebijakan luar negeri China paska perang dagang dan pandemik, adalah untuk melanjutkan BRI (Belt and Road Inisiatif) dan memperkuat Organisasi BRICS (Brazil Russia India China dan South Afrika). BRI berkembang dari sisi bawah menjadi MSR (Maritime Silk Road) yang merupakan strategi geoekonomi China dalam merebut pengaruh Internasional melalui kekuatan ekonomi (*economic power*). Untuk meningkatkan kapabilitas kekuasaan, suatu negara perlu memperhatikan peraihan kepentingan nasional. Kepentingan nasional secara umum diistilahkan sebagai suatu tujuan negara untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dapat tercapai kehidupan yang stabil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun keamanan. Dalam tingkat domestik, China memiliki sejarah kelam yang disebut "*one hundred years of sufferings and humiliations*" dimana sebelum menjadi negara yang utuh, etnis China murni yang disebut sebagai etnis Han sempat digulingkan oleh bangsa Manchu di tahun 1644. Tidak hanya itu, China pernah mengalami eksploitasi ekonomi sekaligus pelanggaran hak-hak terhadap rakyatnya oleh bangsa Barat dan Jepang. Nasionalisme muncul di China ditandai dengan Perang Candu (1839–1840). Atas pengalaman sejarah yang kelam ini, kemudian mempengaruhi China terkait faktor domestik untuk mengambil tindakan tertentu dalam sistem internasional. Dikutip dari Yong Deng, Martin Wight menyebutkan bahwa tujuan politik domestik adalah untuk kehidupan yang stabil, sementara tujuan politik internasional adalah untuk keberlangsungan (*survive*). Perspektif *Innerpolitik* China adalah untuk tidak mengulangi masa kekelaman dengan cara keberlangsungan kehidupan yang stabil bagi warga negaranya, melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain tanpa menciptakan konflik militer sehingga perdagangan dapat berjalan lancar.

Dengan berlandaskan karakteristik neorealisme tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa China harus berupaya untuk berpikir secara rasional dalam tekanan sistem internasional agar pengalaman sejarah kelam China tidak terulang dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, China memanfaatkan interaksi dalam sistem internasional yang dianggap sebagai suatu arena kompetisi untuk memperebutkan kapabilitas kekuasaan antara negara-negara yang berdaulat (*state centric*) untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Republik Rakyat Tiongkok mengimplentasikan kebijakan politik luar negeri yang damai dan bebas merdeka, dimana tujuan pokoknya yaitu untuk memelihara kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, kemudian cerminan kebijakan luar negerinya yaitu untuk menciptakan iklim internasional yang kondusif dengan reformasi China dan keterbukaan serta modernisasi China, disamping untuk memelihara perdamaian dunia dan mendorong perkembangan bersama.

Kepentingan nasional bagi China menjadi wujud negara yang memiliki tujuan untuk meraih hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dalam konsep negara bangsa. Beberapa ilmuwan China yang lain menganggap kepentingan nasional harus diperdalam dengan metode saintifik, mengingat China memiliki keyakinan terhadap logika positivisme dan behavioralisme saintifik sebagai landasan epistemologis dan metodologis dalam teori neorealisme. Artinya China dalam mencapai kepentingan nasionalnya, terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah dan empiris secara saintifik melalui pengaplikasian konsep-konsep dan pengumpulan data-data melalui level analisis, untuk memunculkan ilmu pengetahuan, untuk mengidentifikasi dan menemukan pola (positivis). Kemudian China lebih mementingkan kapabilitas ketimbang intensitas, namun menariknya, china mementingkan isu-isu ekonomi dan kemajuan bersama ketimbang isu keamanan nasional seperti lazimnya neo-realisme, sebab dengan isu ekonomi, maka hubungan negara bangsa akan semakin erat yang menjauh dari isu konflik keamanan.

Terkait prilaku, Deng Xiaoping, pemimpin China sebelumnya, sangat menekankan perhatian terhadap *party line* didalam kepentingan nasional sebagai prinsip tertinggi dalam mengelola hubungan internasional. Deng mengemukakan bahwa kedaulatan nasional dan keamanan nasional harus diprioritaskan, karena hak-hak negara (*quo quan*) lebih penting daripada hak asasi manusia. Sehingga dapat diasumsikan bahwa ketika negara mengambil tindakan berdasarkan kepentingan nasional dengan negara lainnya, konflik akan lebih mudah untuk terselesaikan. Dalam mengkalkulasikan kepentingan nasional, kriteria yang harus termasuk di dalamnya adalah arena internasional, kemampuan nasional, perkembangan teknologi, dan analisis antara ketiganya. China memandang dunia sebagai sebagai sesuatu yang rentan akan konflik (chaotic), ada perebutan kekuasaan antar negara, dan untuk mencapainya tidak jarang kekerasan digunakan oleh para penguasa sebagai solusi. Bahkan Wu X mengemukakan bahwa diplomasi publik seperti komunikasi dan kebudayaan tidak dapat menyelesaikan masalah dalam politik internasional secara efektif. Pemikir neorealis China bertujuan untuk menekankan perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dan teknologi untuk menghadapi ketidakstabilan sosial yang dianggap ancaman bagi negara China. China berasumsi persaingan akan lebih bermakna dibidang ekonomi, ketimbang militer yang berdampak pada kerusakan masif. Sejak perang dingin, persaingan antar aktor dalam sistem internasional memang bergeser dari persaingan militer menjadi persaingan ekonomi. Sementara kepentingan nasional khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dipercaya akan muncul menjadi kepentingan nasional banyak negara pasca perang dingin. Dengan demikian, konsep kepentingan nasional bagi China dilandaskan oleh kaidah yang materialistis.

Naiknya tensi hubungan perdagangan yang terjadi antara China dan *United State* (US) membuat China mengambil langkah-langkah kebijakan demi mempertahankan kestabilan perekonomian. Perang dagang dimana terjadi saling balas penarikan cukai produk impor antar China dan Amerika Serikat yang telah menyalahi kesepakatan perdagangan bebas, telah berdampak signifikan terhadap prestasi dagang kedua negara. Tensi keduanya sedikit menurun ketika Indonesia berhasil mendudukkan kedua kepala negara untuk berdiskusi di

forum internasional G20 di Bali. Namun, persaingan antara kedua negara ini, tampaknya akan berlanjut dalam jangka panjangnya.

Disamping persaingan dengan US, kondisi perekonomian di China baru saja pulih dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis ekonomi di tahun 2023, China telah menyiapkan beberapa kebijakan yang akan mereka terapkan guna menanggulangi krisis ekonomi global tersebut. Dari kebijakan ini dapat diidentifikasi bahwa perilaku China lebih terkategori ke dalam perilaku *defensive realism* yang lebih mementingkan kooperasi kerjasama ekonomi dan kebersamaan untuk mencapai kemajuan bersama. Kebijakan ini bisa dikategori materialistik dan memiliki perilaku kecenderungan untuk menempuh langkah *soft power*. Dengan demikian, keamanan negara akan terjaga karena menjauh dari konflik militer. Konsentrasi kebijakan China yang memilih bersaing dibidang ekonomi adalah indikator bahwa China lebih membina status quo dan menempuh kebijakan *soft power*. Namun dalam kekuatan ekonomi, juga dikenal penjatuhan sanksi ekonomi, boikot produk ekonomi dan pembekuan akun keuangan yang bisa digolongkan ke dalam *hard power* dalam *power* ekonomi. Kebijakan luar negeri China terkait resesi global 2023, diantaranya adalah untuk meneruskan program BRI dan lebih mengaktifkan lagi organisasi BRICS melalui strategi geoekonomi agar lebih berpengaruh dalam tatanan dunia. Namun Arah program BRI lebih bersifat regional ketimbang bilateral seperti yang selama ini dijalankan. Maksudnya agar lebih terciptanya keintegrasikan Kawasan, khususnya keintegrasian ekonomi.

1. Program *Belt and Road Initiatives* (BRI)

Program *Belt and Road Initiative* (BRI) ini dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Program BRI ini, perlahan menjadi praktik *geoeconomic*. Program ini merupakan program yang dilakukan guna mempererat hubungan (*ties*) melalui kerjasama ekonomi dengan negara diberbagai belahan dunia. Inisiatif ini juga dikenal sebagai satu sabuk satu jalan atau *one belt one road*. Nama sabuk dan jalan juga bukan suatu kebetulan. "Belt" dalam hal ini harus mengacu pada jalur darat. Intinya, inisiatif sabuk dan jalan adalah niat China untuk menciptakan atau lebih tepatnya mendukung pengembangan jaringan transportasi Eurasia yang unik dan multidimensi. Jaringan ini terdiri dari jalur kereta api, jalan raya, jalur udara, jalur laut, tetapi juga termasuk jaringan komunikasi. Tidak hanya itu, BRI sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi China tentunya dan juga sebagai sarana diplomasi negara tersebut. Dengan menghubungkan provinsi-provinsi China yang kurang berkembang dengan negara lain, maka diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi beberapa provinsi. BRI ini merupakan proyek raksasa China karena melintasi 3 benua, yaitu Asia, Eropa dan Afrika. Biaya yang harus dikeluarkan oleh China demi kelancaran proyek ini diperkirakan sebesar \$100 miliar per tahunnya. Strategi ini tentunya mengandung kepentingan nasional China didalamnya. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diprediksi akan terjadi sepanjang tahun 2023, maka China akan terus melancarkan program BRI ini. Pengambilan keputusan ini dipandang rasional, karena program BRI ini akan membawa banyak keuntungan bagi China. BRI sebagai geostrategi, dilancarkan melalui *geoeconomic* dalam rangka merebut kepentingan Geopolitik untuk menambah pengaruh China diantara negara-negara yang terkait dalam BRI. Misalnya melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Loan* (pinjaman). Namun kebijakan *Loan* China, bila dianalisa lebih lanjut mengandung klausul-klausul yang merugikan pihak peminjam sehingga biasa disebut sebagai *loan trap*. Contohnya negara Srilanka yang akhirnya bangkrut perekonomiannya karena tidak bisa membayar hutang kepada China. Seperti inilah kepentingan nasional China yang terbungkus dan sulit terlihat sementara melebarkan pengaruhnya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi seperti investasi, pinjaman dan finansial di dalam program BRI. Peristiwa serupa juga banyak ditemui dikasus-kasus kerjasama China dengan negara-negara Afrika seperti Congo. Hasilnya, pengaruh China menjadi lebih besar melalui kekuatan ekonomi yang didapatkannya melalui ketercapaian perebutan kepentingan nasional dengan melancarkan strategi geoekonominya.

FDI atau investasi langsung di sektor Riil dari asal modal luar negeri, dapat membantu suatu negara untuk berkembang. Besarnya nilai investasi yang ditawarkan China, memang sangat menggiurkan. Bertumbuhnya ekonomi di suatu negara tentunya merupakan salah satu tujuan dari tiap-tiap negara. Menurut Ernita dalam Kurniawan (2017), pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Salah satu faktor penting yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan mendatang. Investasi juga bisa dilakukan diberbagai macam bidang, misalnya investasi tanah, emas, deposito, saham, obligasi, dan berbagai macam investasi lainnya. Dalam melakukan investasi, maka investor akan memutuskan atas dasar *return* dan risiko. *Return* merupakan tujuan utama seseorang jika melakukan investasi, yang dimana *returns* adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Dalam investasi, memang wajar jika seorang investor mengharapkan adanya *return* dari dana yang telah ia investasikan, tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti seberapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Dalam level negara, maka motif suatu negara menanamkan investasi ke negara lain pastinya juga atas dasar untuk meraih kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini bisa berdasarkan berbagai aspek selain aspek ekonomi. Investasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta, dimana modal yang didapatkan merupakan penanaman modal dalam negeri swasta maupun penanaman modal asing swasta. Penanaman modal ini akan berputar di masyarakat, sehingga bisa berdampak pada penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan investasi di sektor swasta yang dilakukan oleh China lebih difokuskan di sektor transportasi, gas, dan telekomunikasi. Ambisi China dalam proyek transportasi salah satunya dapat dilihat dari pembangunan dan pengoperasian jaringan kereta api angkutan batubara di Indonesia. Besarnya anggaran pemerintah China dalam menjalankan proyek tersebut, mencerminkan strategi China dalam upaya meraih kepentingan nasionalnya. Analisis berpandangan bahwa dengan mendorong proyek-proyek transportasi di negara-negara di Asia Tenggara, misalnya Laos dan Indonesia, maka China akan menjadi pemenang terbesar dibandingkan dengan mitranya di kawasan Asia Tenggara. Berkaca pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kebijakan China menginvestasikan modalnya diproyek-proyek tersebut, merupakan salah satu inisiatif China dan juga pengimplementasian kebijakan *Belt and Road Initiatives*. Dengan melakukan hubungan kerjasama ekonomi bersama negara-negara Asia Tenggara contohnya, dapat memperkuat pengaruh China di kawasan tersebut. Di tingkat ekonomi makro seperti ini, maka investasi yang dilakukan oleh pemerintah China juga akan membantu menaikkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri merupakan salah satu indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi, jadi misalnya ketika investasi dan pengeluaran pemerintah naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik, dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, adalah hal yang rasional dan logis jika China melakukan kebijakan investasi di sektor swasta, karena investasi yang dilakukannya juga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di China.

Masalah ekonomi pada tahun 2023 sudah ramai dibahas dan menjadi perbincangan *global citizenship* akhir-akhir ini. Tak luput, pergerakan geopolitik China pun kian mewarnai linimasa perkembangan *inews* kontemporer. Dua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China pun diprediksi akan melemah, pada resesi *quarter* ini. Pertumbuhan ekonomi global kemungkinan akan melambat tahun depan di tengah inflasi yang persisten, meskipun mungkin moderat. Dorongan ekonomi dari pelanggaran pembatasan Covid-19 akan memudar di negara-negara ekonomi besar kecuali, mungkin China. Pemerintah tidak merencanakan langkah-langkah stimulus besar, dan bank sentral utama akan terus melakukan pengetatan untuk mengatasi inflasi. Dana Moneter Internasional pada bulan Oktober memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB global akan turun menjadi 2,7% pada tahun 2023, turun dari 3,2% pada tahun 2022 dan tingkat paling lambat dalam 20 tahun terakhir selain dari krisis keuangan global pada tahun 2009 dan guncangan awal Covid-19

pada tahun 2020. Berdasarkan laporan JP Morgan, resesi global juga melanda US dan mengakibatkan beberapa Perbankan Bangkrut. Diantaranya adalah *Silicon Valley Bank* (SIVB), *Signature Bank* dan *Silvergate Bank*. Ketiga perbankan ini mencerminkan industri bidang IT, digital dan Crypto. Dampak resesi 2023 belum sepenuhnya dirasakan, namun melihat indikasinya, kemungkinan resesi 2023 akan sangat berat menghantam perekonomian dunia. Negara yang kurang mempersiapkan langkah strategisnya, kemungkinan akan terdampak secara berat.

Sebelumnya di China, kebijakan "Zero Covid" pemerintah telah berakhir dengan tiba-tiba, dan Beijing telah beralih ke kebijakan stabilisasi ekonomi. Setelah gelombang infeksi covid-19 yang meluas berlalu, pembukaan kembali (reopening) mungkin akan meningkatkan konsumsi, yang sebaliknya hanya mendapat sedikit dukungan kebijakan langsung. Sektor *real estate* China dapat menjadi stabil sebagai respon terhadap langkah-langkah dukungan baru-baru ini. Ekspor tidak mungkin menawarkan banyak dukungan untuk pertumbuhan ekonomi mengingat melemahnya permintaan di tempat lain. Target pertumbuhan tahunan yang diumumkan pada bulan Maret 2022, akan menjadi indikator utama, dengan target di atas 5% menunjukkan pengembalian stimulus berorientasi pada investasi atau asumsi optimis tentang seberapa banyak konsumsi akan meningkat. Meskipun dibawah situasi pertumbuhan ekonomi global yang melambat pada tahun 2023, Menurut Wu Chaoming, selaku wakil direktur Chasing International Institut Ekonomi, ekonomi China akan melawan *trend* tersebut, dengan pertumbuhan PDB riil diperkirakan mencapai 5% hingga 6%. Pertumbuhan konsumsi negara tersebut diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Untuk itu, Wu positif mengklaim bahwasannya Perekonomian Tiongkok memiliki ketahanan yang kuat, potensi besar dan penuh vitalitas. Dengan langkah-langkah manajemen COVID-19 yang sudah dioptimalkan, kinerja ekonomi negara secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023.

Untuk itu sebelumnya, China telah menyiapkan beberapa kebijakan yang mereka coba terapkan guna menanggulangi krisis ekonomi global dengan membuat investasi tahunan yang jauh lebih besar dibidang teknologi dan jauh lebih tinggi tingkat kemampuan manufakturnya. Penilaian itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat China sebagai kekuatan perdagangan ekonomi global, agresif investasi asing, dan kemampuan yang didorong oleh negara untuk mencari ikatan dan pengaruh ekonomi secara global, dicontohkan oleh *Belt and Road Initiative* telah menjadikannya ekonomi global utama.

Tujuan umum BRI sebetulnya adalah untuk pembangunan keterhubungan (connectivity), sehingga memudahkan perdagangan pada jalur BRI dan MSL. Banyak pelabuhan, jalur kereta api dan sebagainya yang telah terbangun. Namun, hasilnya masih belum memuaskan untuk China karena belum terbangunnya keintegrasian secara regional. Untuk itu, Presiden Xi Jinping kembali mengukuhkan slogan *the two centenairies* yang pernah diumumkannya di tahun tahun 2012. Tujuan dari slogan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat China dan untuk menjadi negara yang memiliki demokrasi yang kuat, berbudaya, harmoni dan menjadi negara sosialis yang modern. *The two Centenairies* lebih mengedepankan keintegrasian level regional atau fase kedua setelah kekuatan ekonomi bilateral dapat diraih.

2. BRICS

Dalam pembangunan kekuatan ekonominya, China membangun perindustrian termasuk industri semi konduktor sebagai salah satu fokusnya. Hasilnya China mampu menjadi salah satu raksasa dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dalam memajukan sektor industrinya, maka China membutuhkan impor energi yang cukup besar demi memenuhi suplai energi dalam negeri. Rusia yang merupakan salah satu importir energi bagi negara China sekaligus sebagai *partner* China dalam BRICS, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh China dan Rusia ini memang saling menguntungkan kedua negara. Dari pihak Rusia, kerjasama ini dapat memajukan pasar migas Rusia ke kawasan Asia, setelah sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa atas invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Dengan meningkatkan kerjasamanya dengan China, Rusia dapat meningkatkan ekspor minyak dan

gasnya disamping mempererat hubungan kedua negara. Pendapatan Rusia dari kegiatan ekspor bahan energi ini, merupakan salah satu akun perdagangan terbesar Rusia yang mendatangkan devisa. Oleh karena itu, dengan kerjasama menjadi solusi bagi Rusia menghadapi sanksi dari Eropa dan dalam menghadapi estimasi resesi di tahun 2023. Di lain sisi, China juga memiliki agenda penting di dalamnya. Bagi China, kerjasama dengan Rusia memungkinkan mereka untuk dapat bernegosiasi dengan Rusia mengenai harga energi yang akan diimpor dan bahkan diekspor kembali oleh China sebagai barang dagang ekspor. Dengan kondisi Rusia yang mendapatkan sanksi, maka perilaku China dalam kerjasama ini akan dipandang sebagai bentuk bantuan dari negara sahabat yang akan menambah pengaruh China terhadap Rusia secara bilateral, maupun pada level yang lebih besar lagi seperti BRICS.

Secara umum, arah kebijakan BRICS dimana China termasuk didalamnya adalah dengan membentuk kesepakatan bersama terkait strategi kerjasama BRICS 2025. Yaitu program perdagangan, investasi dan keuangan, program ekonomi digital dan program pengembangan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar dari strategi ini adalah menghormati kemerdekaan ekonomi dari masing-masing anggotanya, keterbukaan dan berbagi informasi dalam pengambilan keputusan dan berkomitmen didalam kerjasama BRICS untuk mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Negara-negara anggota juga berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan didalam 3 (tiga) dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu peran utama China dalam kerjasama ini adalah sebagai hub-industri antara timur dan barat.

Dalam rangka pengaktifasian BRICS, negara-negara anggotanya termasuk China, telah berulang kali melakukan pertemuan untuk melepaskan diri dari hegemoni moneter internasional us dollar. Ditambah lagi oleh peristiwa yang memicu negara anggota BRICS khususnya Rusia yang mengalami embargo ekonomi terkait serangannya ke Ukraina, maka Rusia telah menghapuskan cadangan devisanya dari bentuk US dollar ke dalam yuan renminbi. China telah turut memproposisi perubahan sistem moneter negara-negara BRICS dengan kembali mematok mata uang ke dalam sesuatu yang berharga seperti emas, atau dikenal dengan *the new gold standard*. Hanya saja bentuknya masih belum ditentukan. Bentuk mata uangnya bisa berupa mata uang negara anggota seperti Yuan, Rubel, Rupee ataupun dalam bentuk digital seperti digital yuan. Intinya adalah, selama mata uang tersebut dipatok ke dalam emas ataupun benda berharga dan langka lainnya. Arah kebijakan ini adalah untuk strategi untuk menjauhkan diri dari kekuatan ekonomi berbentuk moneter US dollar. BRICS juga mulai menetralsir kekuatan US dollar dengan memberikan tandingan mata uang pembayaran lainnya selain US dollar dalam pembelian energi seperti migas yang selama ini dikenal sebagai petro dollar.

BRICS juga mulai menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara *middle power* dan *small power* negara-negara berkembang seperti Arab Saudi dan Indonesia. Keberpihakan Arab Saudi kepada BRICS, akan dapat meruntuhkan hegemoni Us dollar dalam pembayaran sumber energis khususnya migas. Keberpihakan, atau bahkan anggota baru BRICS, akan mempercepat keseimbangan kekuatan barat (west power) dalam kompetisi kekuatan. Keberpihakan ini didasari oleh kepentingan strategis. Untuk Indonesia contohnya, keberpihakan ini akan dapat mewujudkan strategi Indonesia dalam menciptakan grup eksportir nikel seperti grup *opeac* sebagai salah satu mineral berharga dunia. Dimana negara-negara lain juga dapat mewujudkan kepentingan strategisnya bila bergabung bersama BRICS. Resesi dunia 2023, lambat laun sepanjang tahun 2023 akan berdampak global, langkah kebijakan-kebijakan yang dilakukan China ini, tujuannya adalah untuk menjauh dari pusaran resesi akibat kehancuran sistem moneter internasional khususnya US dollar akibat krisis energi dan krisis pangan. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh China ini adalah untuk mempertahankan kestabilan kehidupan rakyatnya dan ketenteraman global disamping langkah strategis perbaikan ekonomi paska pandemi-19.

KESIMPULAN

Global Coronavirus Crisis (GCC) menjadi masalah serius di tahun 2019 yang memengaruhi banyak aspek dalam sistem internasional, khususnya pada bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan penurunan perekonomian secara drastis di beberapa negara. Sebagai negara yang paling terlibat dalam krisis Covid-19, China sempat terkena dampak dari krisis tersebut ditandai dengan berhentinya kegiatan ekonomi di China. Akibatnya, banyak negara–negara yang memiliki ikatan interdependensi dengan China ikut terkena kerugian karena peran penting China dalam pertumbuhan PDB di dunia. Dalam menghadapi situasi ini China memerlukan strategi yang rasional untuk *survive* dari ancaman ketidakstabilan ekonomi baik dalam tingkat domestik maupun tingkat internasional.

Dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian China yang saat ini mengalami persaingan panas dengan Amerika Serikat, China membutuhkan kebijakan yang akan menopang perekonomiannya agar tetap stabil dan terus bertumbuh. Beberapa kebijakan yang akan dilanjutkan dan sudah diterapkan China di antaranya adalah: (1) Kebijakan *Belt and Road Initiatives* (BRI), merupakan program yang dapat menumbuhkan iklim kerja sama antara China dengan negara lain; (2) Kebijakan aktivasi BRICS, khususnya kerjasama ekonomi khususnya dibidang energi migas dengan Rusia, serta aktivasi *the new golds standard* dikalangan negara anggota.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan China mampu untuk menghadapi masalah ekonomi di tahun 2023. Selain itu, beberapa kemajuan juga telah dicapai oleh China saat menerapkan kebijakannya, misalnya saja majunya perkembangan infrastruktur dan meluasnya kerjasama China dengan negara lain. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan nasional China untuk mengukuhkan hegemoninya dalam perekonomian global. China merasa perlu untuk merebut kepentingan ini sebagai upaya untuk *survive* dalam persaingan internasional yang anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony H Cordesman. *A World in Crisis: The Winter Wars of 2022-2023*. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/221215_Winter_War_Update.pdf?DYU6shuC3R3yFDMGKqeFQPzT5x53pPzN (Updated Daring; Tanggal 12 Desember 2022)
- Amalisa, Rizki. (2016). Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Rakyat China Di Kawasan Asia Selatan Dan Dampaknya Dibidang Politik Dan Militer. Universitas Hasanudin. Hal.25
- Anam, Syaiful dan Ristiyani, “*Kebijakan Belt and Road Initiatives (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Volume 14 Nomor 2, (2018) <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236> (Diakses Daring; Tanggal 20 Desember 2022)
- BBC Indonesia, “*Proyek Kereta Api China-Laos: Mengapa China Berambisi Bangun Rel Kereta Cepat di Asia Tenggara?*”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57845824> (Diakses Daring; Tanggal 20 Desember 2022)
- CEMBALEST, M I CHAEL. (2023). Eyes On The Market. J.P. Morgan
- Christian, Michael dan Firman Hidayat, “*Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global*” Bab 5 Artikel 1, hal 88-90
- Cordesman, Anthony H. *A World in Crisis: The Winter Wars of 2022-2023*. https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/221215_Winter_War_Update.pdf?DYU6shuC3R3yFDMGKqeFQPzT5x53pPzN (Updated Daring; Tanggal 12 Desember 2022)
- Deng, Yong *Chinese Conception of National Interests in International Relations* The China Quarterly Volume 154 1998 hal 311
- Devi, Savitri Nurlia “*Digitalisasi UKM dalam Ilmu Hubungan Internasional: Studi Kasus Tiongkok*”, Jurnal Sentris KSMPMI, Volume 2, (2019), hlm. 2.
- DONALDSON, John A.. (2017). China's administrative hierarchy: The balance of power and winners and losers within China's levels of government. In *Assessing the balance*

- of power in central-local relations in China (pp. 105-137). Abingdon: Routledge. Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/soas_research/2031 Page 131
- Firdaus, Farid “*China Mau Jual Obligasi Spesial US\$220 Miliar, Gerak Cepat Dana Infrastruktur*”, (7 Juli 2022), diakses dari <https://m.bisnis.com/ekonomibisnis/read/202207/620/1552568>
- Genevieve Donnellon-May, 2023, BRICS expending to Saudi Arabia, Indonesia and Beyond Hold Promise, but Challenges Remain, University of Oxford
- Harini, Setyasih. *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan*. Transformasi Vol. 14 No. 21 tahun 2012 hal. 46
- Hartig, Falk *How China Understands Public Diplomacy: The Importance of National Image for National Interests* International Studies Review, Volume 18, Issue 4, December 2016, Hal 18
- Hartono, Mudji. *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea* Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol. 4 No.1 2008 hal 8
- Jie, Zhang. *China Economy to Recover in 2023*. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/27/W63aab73ea31057c47eba6722.html> (Updated Daring; Tanggal 27 Desember 2022)
- Jusmani, “*Perbitungan Investasi dalam Obligasi*”, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Volume 8, Nomor 1, (April 2011), hlm. 39, 40, 41.
- Jyalita, Vincentia Vahistha Hirrya. (2021). Defensive Realism’s Perspective on Rising China’s Behavior as A Status Quo State. Universitas Katolik Parahyangan
- Kozub-Karkut, M. (2019). Neoclassical Realism and Foreign Policy Analysis- A Possible Way of Integration? *Teoria Polityki*.
- Kurniawan, Agus Indriatno dkk, “*Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Jurnal Inovasi, Volume 13, Nomor 2, (2017), hlm. 69.
- Kusno, Ferdy *Global Political Economy Crisis Impact of Pandemic Covid-19*, Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, hal 114-122
- Listyorini, Inon “*Pengakuan Biaya Riset dan Pengembangan: Tinjauan terhadap SFAS No. 2*”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 4, Nomor 1, (2003), hlm. 2.
- Liu, Z., & Papa, M. (2022). Can BRICS De-dollarize the global financial system? (Elements in the Economics of Emerging Market). Cambridge: Cambridge University Press. Doi:10.1017/9781009029544
- Luttwak, E.N. (1990). From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce.
- Marc Jütten.(2022). Outcome of the 2022 G20 summit in Bali, Indonesia. EPRS
- Ma RR, Xiong T, Bao Y. The Russia-Saudi Arabia oil price war during the COVID-19 pandemic. Energy Econ. 2021 Oct;102:105517. doi: 10.1016/j.eneco.2021.105517. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34898736; PMCID: PMC8652835, Hal. 1-3
- Morrison, Wayne M., (2013). China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. Congressional Research Service Page:39
- Parulian, Friska “*Dampak Penerbitan Obligasi Pemerintah*”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, (2002), hlm. 67
- Putri, Dian Hasbiah dan Suparna Wijaya, “*Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari Ghana dan China*”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume 3, Nomor 2, (2022), hlm. 362.
- Rose, Gideon. *Neoclassical Realism And Theories Of Foreign Policy*. Cambridge University Press 1998
- Saragih, Hendra Maujana. dkk “*Kekuatan Ekonomi-Politik China Pasca Covid-19*”, Daulyah, Vol. 7, No. 1, January 2022 hal 4
- Scobell et., al., 2020, China Grand Strategy, Rand Corporation: Santa Monica
- Sirait, Liana Sri Agustin “*Kerjasama China-Rusia dalam Pemenuhan Kebutuhan Gas China*”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 3, (2018), hlm. 930.

- Suharman, Yoga dan Sugiarto Pramono “*Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok Dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia*” Vol 18, No 1, 2021, hal 2-3
- Tandelilin, Eduardus “*Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*”, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), hlm. 257.
- Tandelilin, *op. cit.*, hlm. 2 & 9.
- World Bank, Global Outlook: Pandemic, Recession: The Global Economic Crisis, June 2020, https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-1553-9_ch1 (Diakses Daring; Tanggal 20 Desember 2022)
- World Bank, *COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II [Press Release]*. June 2020.
<https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2020/06/08/covid19toplungeglobaleconomyintoworstrecession-since-world-war-ii> (Diakses Daring; Tanggal 20 Desember 2022)
- Yudhoyono, “*Teori Ekonomi Lanjutan*”, Edisi Kedua, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).